

KERAKYATAN VERSUS NEOLIBERAL

Oleh Ichsanuddin Noorsy

Perseteruan aliran pemikiran di Indonesia kembali mengemuka setelah Prof Dr Boediono dipilih menjadi Cawapres untuk SBY. Boediono dengan latar belakang ilmu ekonomi dan kebijakan yang diambilnya selama menjadi pejabat publik telah dituding sebagai neoliberal. Wiranto dengan segala kiprahnya menawarkan ekonomi kemandirian. Prabowo Subianto bersama perjalanan kehidupannya memasarkan ekonomi kerakyatan. Jika dirunut ke belakang, perseteruan pemikiran ini berakar pada paham individu versus paham kemasyarakatan atau individualis versus sosialis. Paham individualis berpijak pada kebebasan berpikir dan berbuat. Paham sosialis berpijak pada kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Ketika masuk ke wilayah kehidupan bernegara, hal tersebut menjadi perdebatan ideologi. Dalam untaian pemikiran lebih lanjut untuk tujuan menyejahterakan masyarakat, hal itu menentukan aliran pemikiran ekonomi.

Di Indonesia perdebatan ini minimal sudah terjadi sejak BPUPKI bersidang. Pada 29 Mei 1945 Moh Yamin mengatakan bahwa negara menolak paham liberalisme, demokrasi ala Barat, fasisme dan negara boneka. Soepomo mengambil paham negara integralistik, yakni penghidupan bangsa seluruhnya. "Negara," kata Soepomo, "tidak memihak kepada sesuatu golongan yang paling kuat atau yang paling besar, tidak menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat, akan tetapi negara menjamin keselamatan hidup bangsa dan negara seluruhnya sebagai persatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan."

Pada Bung Karno (BK) pemikiran itu dapat ditelusuri pada tulisannya bertajuk "Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi" pada 1932. Tulisan itu bermuatan pokok sosio demokrasi. Yakni demokrasi politik bersamaan dengan demokrasi ekonomi. Dalam pidato 1 Juni 1945 yang melahirkan Pancasila itu, BK mengatakan, "Jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia marilah kita terima prinsip persamaan politik dan di lapangan ekonomi pun kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya."

Dalam pemikiran Bung Hatta, hal itu dapat dibaca pada "Daulat Rakyat" tahun 1931 dengan menggunakan istilah perekonomian rakyat sebagai lawan perekonomian kolonial yang berwatak perbudakan, menghisap, diskriminatif, mau menang sendiri dan serakah. Dari sana Moh Hatta bersikap bahwa Indonesia belumlah merdeka jika hanya dengan demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi.

Aliran berpikir para pejuang itu dituangkan dalam Kata Pembukaan UUD 1945, pasal 33 dan penjelasannya, serta pasal-pasal 23, 27 ayat (2), 31, dan 34. Kata kunci dari ekonomi kerakyatan itu adalah penjelasan pasal 33 UUD 1945 yang dipangkas oleh

sejumlah ekonom Indonesia. Yakni, *dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan dan penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang.*

Pemikiran *founding fathers* ini dilanjutkan oleh Sritua Arief, Mubyarto dan Sri Edi Swasono. Sritua Arief dengan pemikiran permintaan efektif yang dalam kebijakan ekonomi berarti mengutamakan kekuatan nasional dan penguasaan pasar domestik oleh pelaku nasional. Mubyarto dengan pemikiran "Sistem Ekonomi Pancasila"-nya. Sementara Sri Edi Swasono dengan penolakan ekonomi subordinasinya. Revrison Baswir, Hendri Saporini, Iman Sugema dan saya memahami dan menerjemahkan hal itu sebagai Ekonomi Konstitusi 1945.

Dalam bahasa yang lebih ringkas, barang dan jasa publik harus tetap dikuasai, diatur, diperuntukan dan didayagunakan bagi setinggi-tingginya kemakmuran rakyat luas, dan pemerintah tidak didikte oleh mekanisme pasar. Pada perspektif ini, paham individualis tidak berlaku karena hajat hidup orang banyak yang dijunjung. Karena Indonesia juga mengakui, menerima dan melakukan pergaulan internasional, maka dalam perekonomiannya bersifat *closed open circuit economy*. Artinya keuangan dan komoditas tertentu diberlakukan tertutup selama domestik mengalami defisit. Kebutuhan modal pembangunan, jika menggunakan pemikiran Sritua Arief, berpijak pada permintaan efektif yang menciptakan tabungan nasional sehingga tabungan ini dapat digunakan untuk investasi. Sementara kekurangan atau ketiadaan komoditas tertentu dipasok dari dalam negeri. Jika kemampuan dalam negeri terbatas, maka pasokan dari luar negeri tidak boleh menciptakan situasi ketergantungan. Itu berarti pembangunan harus berpijak pada sinergi padat karya dan padat modal. Dari cara berpikir ini, jelas sekali bahwa menerima utang luar negeri nyaris tidak diperkenankan. Apalagi sampai memenuhi syarat-syarat yang menjungkir balikkan ekonomi konstitusi.

Pemikiran neoliberal dapat ditelusuri melalui Adam Smith, seorang filosof yang menerbitkan buku *The Wealth of Nations* (1776). Sebagai penganut paham individualis dan pembela kaum industri, Smith mengharamkan campur tangan pemerintah dalam mekanisme pasar karena pasar akan mampu menggenahi dirinya sendiri. Tangan-tangan tak terlihat akan menciptakan keseimbangan penawaran dan permintaan dalam pasar komoditas maupun pasar surat-surat berharga (pasar uang dan pasar modal). Intinya adalah akumulasi modal dengan keniscayaan memperoleh keuntungan semaksimal-maksimalnya karena pasar mengatur dirinya sendiri. Sebelumnya sekitar 1729 di Inggris lahir *The Bubble Act* sebagai, yakni melarang para pemilik uang untuk menjual belikan surat-surat utang. Kekuatan lobbi para pemilik modal pada penguasa luar biasa sehingga pada 1829 UU itu dicabut dan uang dengan motif spekulasi dimulai lagi.

Bersamaan dengan dinamika perekonomian yang didukung oleh keberhasilan revolusi industri, maka pada awal abad 19 David Ricardo meyakinkan kerabatnya tentang kegunaan dan keuntungan perdagangan internasional. Sejak saat itu isu tentang pertarungan kaum merkantilis yang melindungi kepentingan ekonomi nasional (dengan subyektivitas agar bisnis dan pasar mereka tidak tergerus) berhadapan dengan kaum industriawan yang menolak proteksionisme. Puncak dari pergumulan ini adalah perebutan pasar serta sumberdaya energi dan produksi. Maka lahirlah Perang Dunia I dan II. Amerika Serikat (AS) tidak lagi menghendaki Eropa mendominasi perekonomian. Sekaligus diperlukan strategi baru bagaimana mengatur perekonomian dalam pergaulan internasional. Pemikiran inilah yang melahirkan apa yang disebut Breton Woods, yakni tiga lembaga ekonomi (Bank Dunia, IMF, dan GATT yang kemudian menjadi WTO) dan satu lembaga politik (PBB). AS-lah penentunya yang berhadapan dengan Uni Soviet. Fokus utama tidak berubah, yakni mekanisme pasar bebas, kebebasan korporasi meningkatkan skala ekonomi melalui perluasan pasar melewati batas negara, tidak dikenal barang dan jasa publik.

Tetapi liberalnya pasar ini menemui kegagalan karena AS terus mengalami defisit anggaran dan defisit perdagangan. Karena itu pada Juli 1971 Presiden AS Richard Nixon mengubah sistem nilai tukar tetap menjadi mengambang dan cadangan devisa diubah dari emas menjadi dolar AS. IMF “menerapkan” pada anggotanya melalui Jamaica Agreement pada 1976. Toh, situasi perekonomian AS tidak berubah. Perekonomian Inggris juga mengalami hal yang sama. Dua negara “sekandung” ini berpendapat, kesejahteraan mereka beralih ke negara lain terutama karena Jepang dan Jerman telah kembali menancapkan pengaruhnya dalam kancah perekonomian. Maka lahirlah *Washington Consensus* sebagai koreksi atas kegagalan bangun pemikiran ekonomi Bretton Woods berbasis ekonomi neoklasik. Konsensus ini bisa diringkas pada soal (1) larangan menyubsidi rakyat dan membiaya penyediaan dan pengelolaan barang dan jasa publik melalui istilah disiplin fiskal; (2) jika pemerintah sudah terlanjur terlibat pada penyediaan barang dan jasa publik, maka harus dijual kepada swasta. Inilah yang dikenal dengan privatisasi. Dan (3) meliberalkan semua sektor perekonomian dengan memberlakukan asas non diskriminatif antara pelaku asing dan pelaku nasional. Hasilnya adalah, AS dan terutama negara G7 serta negara-negara yang berpatron ke prinsip neoliberal itu mengalami krisis lagi pada Oktober 2008. Menurut catatan National Bureau of Economic Research, krisis ekonomi yang disebut sebagai siklus bisnis itu sudah terjadi 33 kali sejak 1854 sampai dengan 2007. Dalam kajian ekonomi politik dan sosiologi pembangunan, maka ekonomi neoliberal selalu menghadapi kegagalan mengatasi pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan. Ekonomi berbasis neoliberal sebagaimana dikaji ilmuwan Barat sendiri telah membuat orang kaya makin

kaya dan kaum papa makin ternista. Neoliberal bahkan telah memposisikan pengusaha berhadapan dengan rakyat.

Jan Tinbergen menemukan penyebabnya, yakni karena *the greedy capitalism* (1992) yang oleh Joseph E Stiglitz disebut sebagai *market fundamentalism* (2002). Mungkin dengan sebagian alasan itulah sejak awal *the founding fathers* kita menolaknya dan membahasakan ideologi ekonomi Indonesia sebagai sosialisme Indonesia walau istilah ini tidak ditemukan dalam UUD 1945. Bagaimana ke depan? Tergantung kita, setia pada pemikiran anak bangsa dan cinta pada rakyat Indonesia atau memilih aliran pemikiran ekonomi yang selalu menemui kegagalan.##

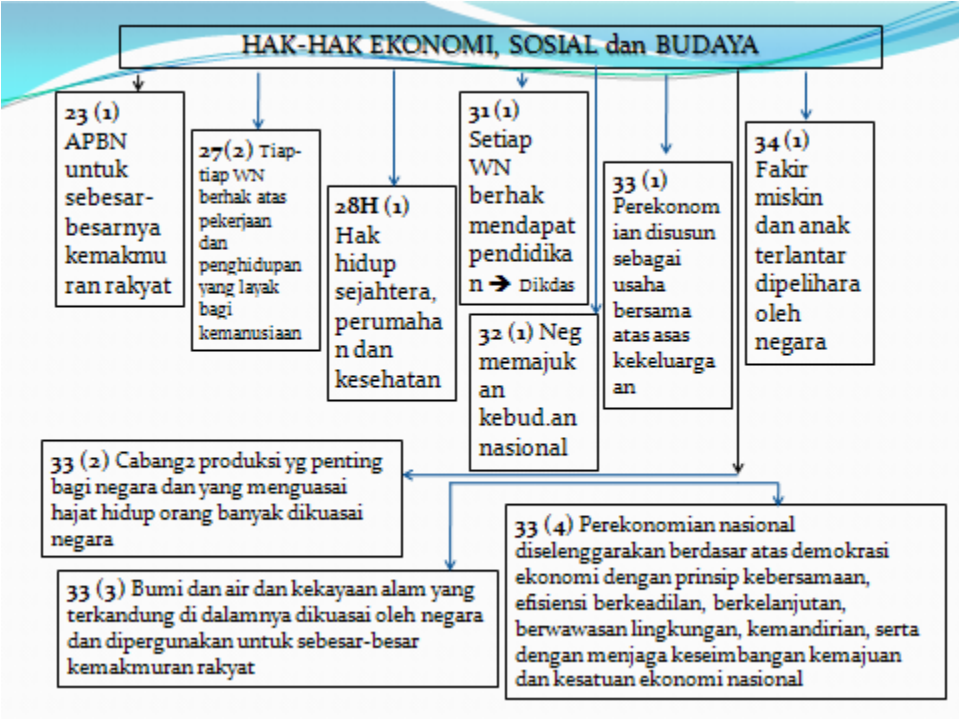
Jakarta, 3 Juni 2009

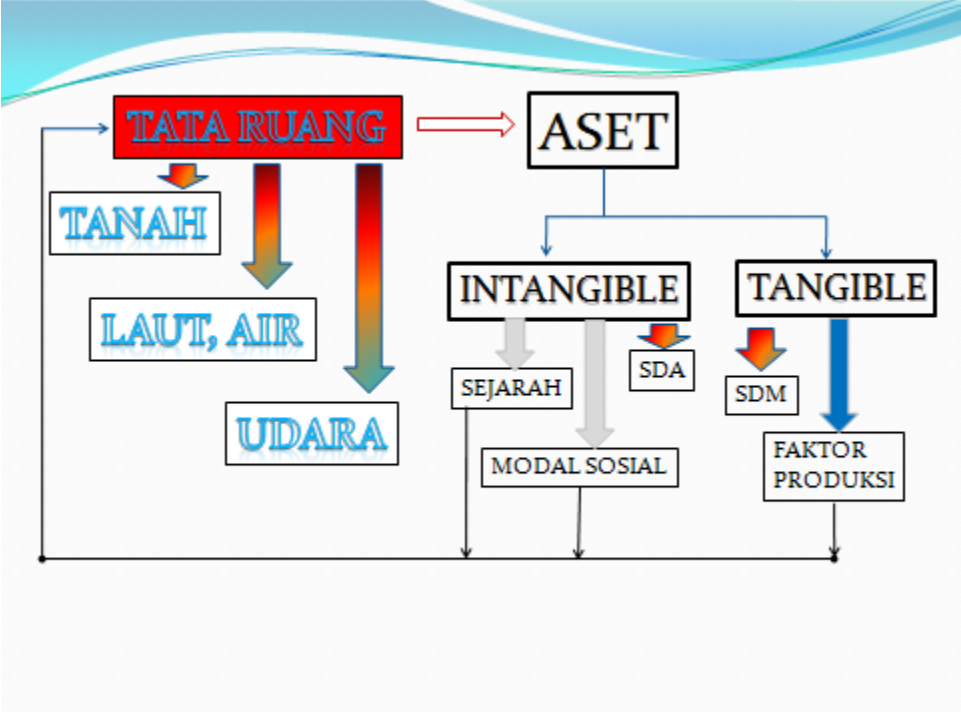
KATA PEMBUKAAN

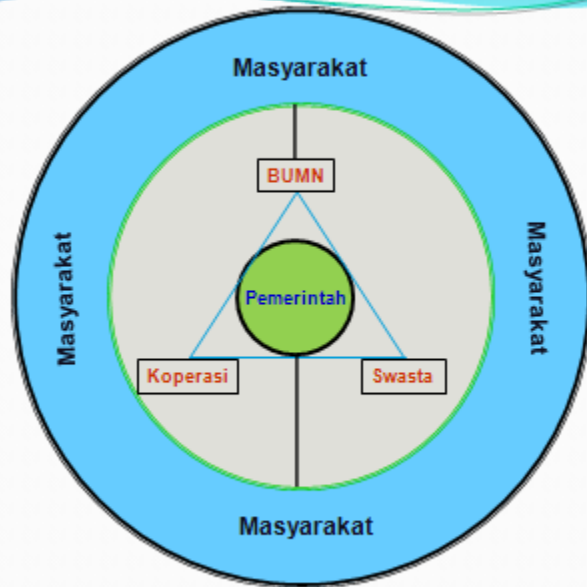
1. Penjajahan (dengan segala bentuknya) harus dihapuskan
2. Berkat rahmat Allah rakyat Indonesia merdeka
3. Membentuk Pemerintah Negara Indonesia yang:
 - Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah;
 - Memajukan kesejahteraan umum;
 - Mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosialMAKA disusunlah Kemerdekaan Bangsa Indonesia

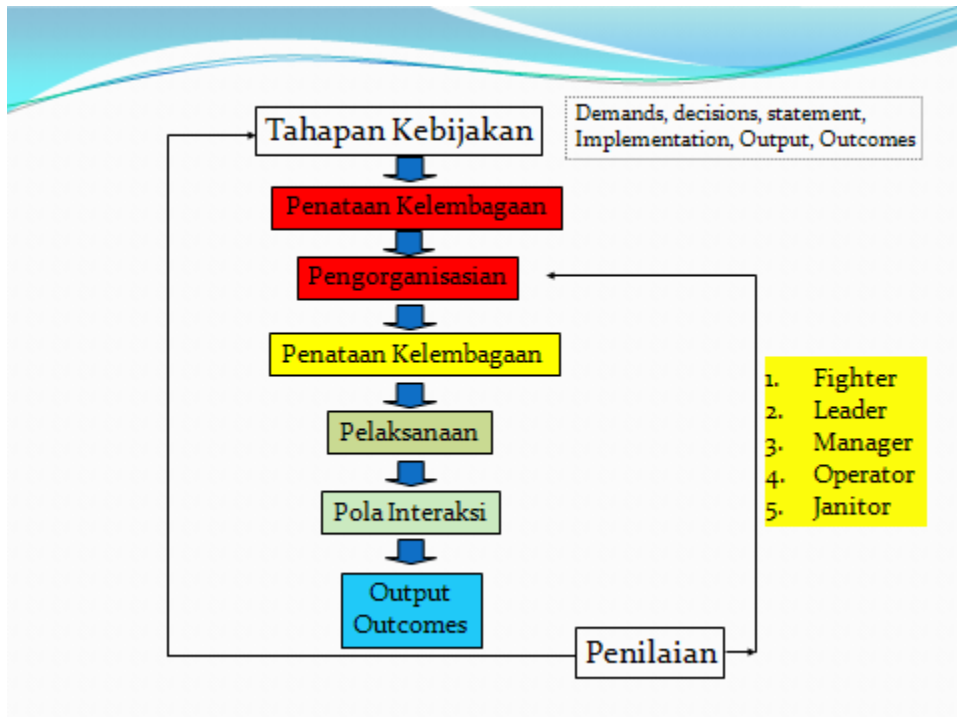
AMANAH KONSTITUSI

HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL dan BUDAYA









12 Juli 2007

Presiden: Pemerintah Indonesia tidak Etatis dan tidak Neolib → UU 25/07 ttg Penanaman Modal dan Penilaian WTO

19 Juli 2007

Gub BI BA, "Pertumbuhan Tidak Berkualitas." → Masuk KPK

21 Juli 2007

Menko Perekonomian, "Pemerintah memang terlalu banyak janji, sedikit yang direalisasi." → Menjadi Gub BI Mei 2008

26 Juli 2007

DGS Miranda, "Tidak ada yang salah dengan kebijakan." → MSG menyuap, kasus Agus Tjondro

24 Mei 2008 → BBM naik 27% pada 24 Mei 2008 setelah kenaikan 124% pada Okt 05

Pentingnya kepemimpinan memenuhi indikator:

1. Melindungi pengikut / rakyat;
2. Mencerdaskan dan menyejahterakan pengikut/rakyat;
3. Menumbuhkan dan mengembangkan keyakinan pengikut/rakyat bahwa perjalanan ke depan adalah benar.

(Bandingkan majalah *Time* 15 Juli 1974
versa Kata Pembukaan UUD 1945)